

**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Riyan Iskandar
151010030**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Riyan Iskandar
151010030**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Riyan Iskandar
NPM : 151010030
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

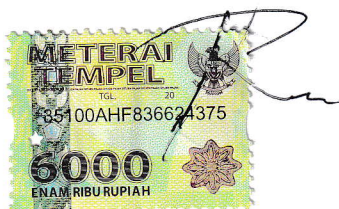
ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “Skripsi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya didalam naskah “Skripsi” ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah “Skripsi” ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah “Skripsi” ini digugurkan dan “Skripsi” yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Januari 2021



Riyan Iskandar
151010030

**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:
Riyan Iskandar
151010030**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 28 Januari 2021



**Timbul Dompok, S.E., M.Si
Pembimbing**

ABSTRAK

Banyaknya jumlah titik parkir yang ada di Kota Batam, pengelolaan yang optimal sangat diperlukan sebagai sumber penambahan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam melalui Retribusi Parkir. Akan tetapi dari pengelolaan yang dilakukan oleh UPT Pelayan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam selaku pelaksana teknis daerah. Pemungutan pelayanan parkir sebagai sumber penerimaan retribusi parkir selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan 2019 masih belum optimal atau masih dibawah target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan oleh UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan proses pengambilan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik penyajian data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan yang dilakukan UPT Pelayanan Parkir masih belum optimal dengan jumlah realisasi penerimaan retribusi parkir masih dibawah target yang telah ditetapkan, seperti masih kurangnya juru parkir untuk mengisi titik parkir yang ada, kurangnya anggaran untuk fasilitas parkir sehingga setiap titik parkir tidak semua marka parkirnya ada dan setiap tahunnya terdapat titik parkir baru yang belum dikelola. Padahal sebagai sumber penerimaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sangat membantu penerimaan daerah Kota Batam. Dalam meningkatkan anggaran belanja daerah yang dapat digunakan untuk membangun kota Batam yang lebih sejahtera dan makmur. Adapun faktor penghambatnya yaitu: kurangnya juru parkir, masih adanya titik parkir yang tidak memiliki marka parkir, dan banyaknya masyarakat yang parkir di sembarangan tempat.

Kata Kunci: Pelayanan; Retribusi Parkir; Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

The large number of parking points in Batam City, optimal management is needed as a source of additional Batam City Local Revenue through Parking Charges. However, from the management carried out by the UPT Parking Servant Batam City Transportation Service as the regional technical implementer. Collection of parking services as a source of receiving parking fees for the last three years, namely 2017 to 2019, is still not optimal or is still below the predetermined target. The purpose of this study is to analyze how the management of parking fees carried out by the UPT Parking Service of the Batam City Transportation Service. This study uses a qualitative approach, with the process of collecting data through interviews, documentation and observation. The technique of presenting data is done by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the management carried out by the UPT Parking Service is still not optimal with the number of realized parking fees still below the predetermined target, such as there is still a lack of parking attendants to fill existing parking points, lack of budget for parking facilities so that not all parking points are available. There are parking markings and every year there are new parking points that have not been managed. In fact, as a source of revenue for parking fees in increasing Regional Original Revenue, it is very helpful for the revenue of Batam City. In increasing the regional expenditure budget that can be used to build a more prosperous and prosperous Batam city. As for the inhibiting factors, namely: lack of parking attendants, there are still parking spots that do not have parking markings, and the large number of people who park in random places.

Keywords: Service; Retribution Parking; Regional Original Revenue.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si;
2. Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora sekaligus Ketua Program Studi Administrasi Negara Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si;
3. Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si. selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan motivasi untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
5. Bapak dan Ibu Dosen Administrasi Negara Universitas Putera Batam;
6. Bapak dan Ibu penguji yang bersedia menjadi penguji serta memberikan saran dan kritikan yang bermanfaat bagi penulis;
7. Bapak Rustam Efendi SE., M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam;

8. Bapak J. Alexander Banik, S.SiT selaku Kepala UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam;
 9. Ibu Lya Ratri Arum, S.Tr selaku Kassubag UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam ;
 10. Narasumber penulis dalam melaukan penelitian ini, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu;
 11. Kedua orang tuaku ayahanda Matsyah Bin Tahir dan ibunda Saiyah Binti Awang Kecil yang sangat penulis sayangi, dan menjadi motivasi terbesar untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. serta abang dan kakakku yang penulis sayangi selalu memberikan doa, motivasi, dukungan baik materil maupun moril;
 12. Sahabat-sahabatku seperjuangan di kelas Administrasi Negara 2015 yang selalu memberikan semangat, motivasi, membantu penulis dalam melakukan penelitian ini dan selalu memberikan kenangan indah dimasamasa selalu bersama;
- Semoga Allah yang Maha Kuasa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-NYA, Amin.

Batam, 28 Januari 2021



Riyan Iskandar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Teori Dasar	10
2.1.1. Pengertian Pengelolaan.....	10
2.1.2. Indikator Pengelolaan	12
2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan	15
2.2. Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.3. Retribusi Parkir	18
2.4. Penelitian Terdahulu	20
2.5. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian.....	26
3.3 Sumber Data	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Metode Analisis Data	30
3.6 Keabsahan Data	30
3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian.....	32
3.7.1. Lokasi	32
3.7.2. Jadwal Penelitian	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Batam.....	34
4.1.1.1 Sejarah Penyelenggaraan Parkir di Kota Batam	34
4.1.1.2 Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam.....	36
4.1.1.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Batam	37
4.1.1.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam.....	38
4.1.2. Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Batam.....	42

4.1.3. Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Parkir	50
4.1.4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam melalui Retribusi Parkir.....	54
4.2 Pembahasan	55
4.2.1. Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam	55
4.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Parkir	58
4.3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam melalui Retribusi Parkir.....	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Simpulan	60
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Pedoman Wawancara dan Dokumentasi	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gmbaar 1.1 Kerangka Pemikiran	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam	38

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penerimaan Retribusi Parkir Kota Batam Tahun 2017-2019.....	3
Tabel 3.1 Data Informan.....	28
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Juru Parkir Umum Kota Batam Tahun 2020	41
Tabel 4.2 Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Tahun 2020.....	44
Tabel 4.3 Penerimaan Retribusi Parkir Kota Batam Tahun 2017-2019.....	54
Tabel 4.4 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Tahun 2017- 2019	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menjadi sistem yang dianut oleh Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada berbagai pertimbangan mengingat banyaknya kepentingan yang harus pemerintah pusat kerjakan, sehingga diberikannya kewenangan kepada suatu daerah yang ada di Indonesia untuk mengelola pelaksanaan pemerintahan di daerahnya sendiri (Rosidin, 2015:76). Oleh karena itu, desentralisasi yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat penting dalam mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah yang ada diseluruh indonesia, diharapkan daerah dapat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh kegiatan untuk memajukan daerahnya. Dan pemerintah pusat dapat mengatur urusannya, dengan tidak terlalu banyak mengatur daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Serta pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam memajukan daerahnya sendiri tanpa adanya intervensi dan tekanan dari pihak lain dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rosidin, 2015:75). Sejalan dengan itu, sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, membuat banyaknya kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah di

Daerah untuk mengerjakan urusan pemerintahannya masing-masing. Undang-Undang ini telah menjadi landasan bagi terlaksananya otonomi daerah di Indonesia. Sistem ini mengharuskan adanya perubahan untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan berinovasi dalam mencari berbagai sumber pemasukan yang mampu digunakan untuk membiayai belanja atau pengeluaran pemerintah daerah.

Penerimaan terbesar daerah yang berasal dari wilayahnya itu sendiri salah satunya ialah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bertujuan meenyerahkan kekuasaan kepada suatu daerah agar dapat mengoptimalkan potensi anggaran dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang merupakan bentuk dari desentralisasi. Sumber pemasukan daerah yang memiliki nilai yang cukup tinggi adalah pajak retribusi daerah dan pajak daerah. Berlandaskan Pasal 1 (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dijelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa, pelayanan atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan dan / atau difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau perseorangan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi daerah sebagai salah satu penyumbang penerimaan keuangan daerah menjadi suatu andalan pendapatan asli daerah. Adapun beberapa kelebihan retribusi sebagai pemasukan pendapatan asli daerah bila dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah yang lainnya ialah pelayanan yang dijalankan dari retribusi bisa dipungut secara berkelanjutan atau terus-menerus, bagi masyarakat dan pengguna yang menggunakan pelayanan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah (Pasla, 2016:13). Retribusi daerah juga menjadi dasar dari penerimaan daerah, yang fungsinya sebagai pendorong dalam menabuh pendapatan asli daerah. Adapun salah satu komponen dari retribusi daerah sebagai sumber penerimaan yang sah yaitu retribusi parkir.

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tatakelola dalam pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Retribusi parkir secara umum merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau Badan (Yani, 2012:55).

Seperti halnya Kota Batam yang salah satu sumber pendapatannya berasal dari retribusi yang sangat penting peranannya dalam meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sumber penerimaan retribusi ialah retribusi parkir di kota Batam. Banyaknya penduduk dan kendaraan yang ada di kota Batam setiap harinya, sudah semestinya harus disertai dengan jumlah titik parkir yang ada, karena setiap kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat sudah pasti akan berhenti di tempat tertentu. Untuk itu pemerintah nantinya akan menjadi aktor penting dan aktif dalam mengurus titik parkir yang ada di kota Batam.

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, semoga pemerintah daerah mampu memberi sumbangsih dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah kota Batam. Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab pelaksanaan terhadap penerimaan retribusi parkir telah aktifkan 625 titik parkir jalan umum. Melihat banyaknya area parkir tersebut semestinya pendapatan yang didapatkan dari retribusi parkir dapat lebih ditingkatkan dari pendapatan yang sudah direalisasi sejauh ini.

Namun terhadap realisasinya pendapatan dari retribusi parkir dapat dikatakan masih berada dibawah target yang ditetapkan. Adapun penerimaan dari retribusi parkir yang dirangkum dalam realisasi penerimaan daerah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penerimaan Retribusi Parkir Kota Batam Tahun 2017-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2017	Rp 6.000.000.000	Rp 5.067.737.400	84.46 %
2.	2018	Rp 10.000.000.000	Rp 7.238.180.800	72.38 %
3.	2019	Rp 11.000.000.000	Rp 6.838.115.125	62.16 %

(Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2020)

Dapat dikatakan dari tabel realisasi penerimaan di atas bahwa retribusi parkir di Kota Batam belum mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan pungutan retribusi parkir mulai dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan dikarenakan target yang ditetapkan meningkat setiap tahunnya sedangkan realisasi pendapatan yang diterima menurun. Hal ini menjadi problematika yang dihadapi dengan belum optimalnya penerimaan retribusi parkir yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan permasalahan yang ada retribusi parkir di kota Batam perlunya perhatian yang serius, dengan banyaknya penerimaan retribusi parkir yang belum dikelola dengan optimal dan adanya oknum yang tidak bertanggungjawab mengambil keuntungan dari situasi ini. Keadaan tersebut semestinya mendapatkan perhatian yang harus lebih serius dari pemerintah kota Batam yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam selaku pihak yang mengelola perparkiran, sehingga pendapatan dari retribusi parkir dapat lebih dioptimalkan dan sejalan dengan potensi yang ada.

Terkait masalah pengelolaan retribusi parkir, sudah banyak para ilmuwan yang meneliti, dalam hal ini penulis membagi penelitian terkait retribusi parkir yaitu *pertama*, Penelitian oleh (Komang Sutami dkk, 2017), berjudul Analisis Pengelolaan Anggaran Retribusi Parkir Kabupaten Buleleng. *Kedua*, Penelitian oleh (Delma Marlina Pasla 2016), berjudul Pengaturan Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Kota Manado. *Ketiga*, Penelitian oleh (Fitri Rosmala Dewi dkk, 2016) berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Retribusi Parkir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintahan Kota Palu.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas yang membahas terkait masalah retribusi parkir, masih belum maksimalnya pendapatan dari retribusi parkir yang seharusnya menjadi sumber penerimaan daerah dan berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu perlu adanya tindakan yang serius dalam menanganinya.

Pengelolaan retribusi parkir di kota Batam memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam mengatur dan mengelola terhadap kelangsungan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan bertanggungjawab mengenai penyediaan atas jasa parkir yang nantinya bias digunakan untuk masyarakat yang memakai jasa tersebut. Dalam pengelolaannya Dinas tersebut memiliki banyak unsur pelaksana teknis, salah satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada bagian pengelolaan parkir. UPT parkir merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang membidangi pengelolaan parkir, di mana UPT parkir tersebut bertanggungjawab secara keseluruhan mengenai pengelolaan retribusi parkir.

Dalam pelaksanaannya UPT parkir tersebut melibatkan para pegawai sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai para pelaksana. Khususnya pengelolaan retribusi parkir di kota Batam agar penerimaan dari segi ini lebih optimal dan dapat menambahkan jumlah Pendapatan Asli Daerah, yang hal ini dilaksanakan oleh UPT Pelayan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam selaku pelaksana teknis daerah. Selain itu, peran dari kepala dinas sangat diperlukan guna untuk mengarahkan dan membuat perencanaan terhadap kelangsungan pelaksanaan dan pengelolaan retribusi parkir

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas tadi, penulis menganggap hal ini perlu untuk diteliti agar pengelolaan retribusi parkir dapat dibenahi dan diperbaiki kekurangan yang ada agar mampu meningkatkan penerimaan daerah, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?
2. Apa faktor penghambat Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dikaji ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam
2. Untuk menganalisis faktor penghambat Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dikaji ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan wawasan serta pengetahuan peneliti dan pengembangan keilmuan mengenai Program Ilmu Sosial dan Humaniora, dalam Program Studi Administrasi Negara khususnya mata kuliah Pelayanan Publik, Manajemen Pelayan Publik, dan Pengantar Ilmu Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa dan para peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini lebih mendalam dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam studi kepustakaan tentang pengelolaan retribusi parkir yang ada di kota Batam.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam selaku pelaksana teknis dalam pelayanan parkir dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan mengenai proses pelaksanaan serta pengelolaan retribusi parkir kota Batam yang ditinjau dari berbagai indikator seperti, jumlah titik parkir yang bisa lebih dioptimalkan dan evaluasi mengenai faktor penghambat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan Retribusi Parkir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah kegiatan yang melakukan sesuatu agar lebih sistematis dan relevan. Adisasmita (2011:21) mengemukakan bahwa: Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam studi ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) yang biasanya dilihat pada suatu proses menangani atau mengurus sesuatu agar tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Jadi dapat dikatakan pengelolaan ialah sebuah ilmu manajemen yang berkaitan dengan proses menangani dan mengurus suatu kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga yang telah disepakati bersama.

Selanjutnya Admosudirjo (2012:160) mengatakan pengelolaan merupakan penggunaan dan pengaturan semua aspek perencanaan kerja diperlukan untuk mencapai dan mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dari beberapa pengertian diatas Admosudirjo mengfokuskan pengelolaan merupakan suatu proses memanfaatkan, mengatur, dan mengendalikan semua bentuk sumber daya untuk tercapainya tujuan, agar sejalan dengan kegiatan perencanaan yang sudah ditetapkan.

Lebih jelas disampaikan Moekijat (Adisasmita, 2011:21) memaparkan definisi pengelolaan ialah suatu kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pemantauan yang dilakukan

untuk mencapai dan menetapkan suatu tujuan dengan cara menggunakan manusia dan sumber daya lain. Dalam hal ini, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lain.

Sedangkan Terry (2011:9) menyatakan bahwa, pengelolaan itu sendiri sama dengan manajemen sehingga manajemen dipahami sebagai proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian dengan menggunakan ilmu dan seni untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditentukan. Manajemen atau yang sering disebut dengan manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan di dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pemantauan. Adapun istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang artinya mengatur, membimbing, atau menangani, dan memimpin.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan diatas, menurut Raharjo Adisasmata (2011:22) dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, tetapi serangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses dimana langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Kasmir, 2018:10).

2. Pelaksanaan

Menurut Bintor Tjokroadmuadjoyo dalam (Adisasmita, 2011:24) dengan melaksanakan berbagai kegiatan sebagai suatu proses yang sistematis, diawali dengan pedoman atau peraturan untuk mencapai tujuan, pedoman tersebut dikelola dalam bentuk proyek dan program kerja. Adisasmita (2011:24) mengatakan bahwa sumber daya manajemen mutu yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan baik menghasilkan sesuatu yang diinginkan pekerjaan dengan memenuhi persyaratan yang diinginkannya, termasuk keterampilan, perilaku, sikap, dan kepribadian.

3. Pengawasan

Suatu proses kegiatan untuk menilai keberhasilan apakah sudah berjalan baik dengan rencana yang telah tentukan atau tidak, sehingga diperlukan sebuah pengawasan. Sujamto mengatakan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan atau usaha unrtuk mengetahui dan menilai realita yang sebenarnya dengan semestinya (Adisasmita, 2011:25).

2.1.2 Indikator Pengelolaan

Dalam hal ini pengelolaan merupakan suatu tahapan proses yang sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen. Adapun menurut Nickles, McHug and McHug (Mukarom, 2015:55) mengemukakan empat fungsi manajemen yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam proses pengelolaan yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan atau *planning*, adalah suatu upaya dilakukan untuk mengantisipasi keadaan masa depan dengan mendefinisikan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diberikan. Adapun kegiatan perencanaan meliputi:

- 1) Menetapkan tujuan dan target
- 2) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan
- 3) Menyediakan sumber daya yang diperlukan
- 4) Menentukan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian atau *organizing*, yaitu mengembangkan rencana dalam struktur organisasi untuk memastikan bahwa seluruh anggota dalam organisasi bisa bekerja dan berpartisipasi secara efektif dan efisien agar tercapainya tujuan. Beberapa pelaksanaan pengorganisasian meliputi:

- 1) Merumuskan, mengalokasikan sumber daya, , menetapkan tugas, dan prosedur.
- 2) Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab
- 3) Merekrut, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia atau tenaga kerja.
- 4) Menempatkan sumber daya manusia atau pekerja pada posisi yang paling sebenarnya.

3. Pengimplementasian

Pengimplementasian atau *directing*, yaitu untuk melaksanakan program sedemikian rupa sehingga pihak-pihak dalam organisasi dapat memandu dan memotivasi semua pihak untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan cara yang sangat sadar dan produktif. Kegiatan pengimplementasian meliputi:

- 1) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian arahan kepada sumber daya manusia agar dapat bekerja secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan
- 2) Pemberian tugas dan penjelasan rutin tentang pekerjaan yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan yang ada.

4. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan pengawasan atau *controlling*, adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua langkah operasional yang direncanakan, diatur dan dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dalam tercapainya target dan tujuan organisasi sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.
- 2) Mengambil langkah pengkoreksian atas kesalahan yang bisa saja dijumpai.

- 3) Melakukan berbagai alternatif solusi dalam memecahkan masalah dalam pencapaian tujuan dan target organisasi

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan

Dalam ulasan oleh Soerjono Soekanto (2014:9) jika dikaitkan dalam menilai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi parkir yaitu;

1. Kebijakan atau regulasi, yang didalamnya akan dibatasi dalam undang-undang. Karena undang-undang sangat berpengaruh mengenai kewenangan dan kewajiban serta tolak ukur dari menilai bagaimana suatu lembaga bekerja sesuai arahan peraturan.
2. Sumber daya manusia, yakni pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pengelolaan. Perlunya penganggaran yang cukup bagi Lembaga menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Faktor kebudayaan masyarakat yakni lingkungan dimana pengelolaan tersebut berlangsung atau diterapkan. Edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar lebih mengetahui mengenai pelayanan parkir yang diselenggarakan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Kurnarjo (2011: 227) Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan daerah dari pajak daerah, pajak daerah, perusahaan daerah dan perusahaan daerah lainnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah sumbangan wajib kepada daerah yang dibayarkan oleh perseorangan atau badan hukum yang bersifat paksaan menurut undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan. Sumber pendapatan daerah yang berperan penting salah satunya adalah retribusi daerah. Secara umum, retribusi daerah adalah pembayaran kepada pemerintah oleh pengguna layanan pemerintah. Menurut Prawirohardjono (Adisasmita, 2011:109) retribusi daerah merupakan pajak daerah sebagai imbalan atas penggunaan atau penerimaan jasa untuk pekerjaan, bisnis atau properti daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Retribusi daerah diselenggarakan sesuai dengan undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di setiap daerah, pungutan retribusi daerah

diuraikan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada.

Beberapa pengertian yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain :

1. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan dan / atau diberikan secara khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan;
2. Retribusi perizinan tertentu adalah imbalan untuk kegiatan pemerintahan tertentu dalam rangka pemberian izin kepada perseorangan atau badan yang ditujukan untuk pengembangan, pengaturan, penguasaan dan pengawasan kegiatan dan pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumber daya alam, aset, prasarana, bangunan, atau bangunan tertentu dalam rangka menjaga kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Dalam penyelenggaraannya adapun ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut (Adisasmita, 2011:110):

1. Pungutan dilakukan oleh pemerintah daerah
2. Pengenaan pungutan bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah
3. Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Kekayaan yang dipisahkan adalah salah satu komponen kekayaan negara yang dikelola oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD, yang antara lain berasal dari bagian laba perusahaan daerah, bagian keuntungan lembaga keuangan perbankan, bagian keuntungan penyertaan modal pada badan usaha lain.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

2.3. Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir. dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Ada beberapa pengertian yang

disebutkan dalam peraturan tersebut tentang pelayanan parkir, yang perlu dijelaskan maksud dari peraturan daerah tersebut:

1. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh daerah.
2. Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di ruang milik jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan atau badan.
3. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah untuk biaya jasa atas pelayanan parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
4. Sarana Parkir adalah perangkat/fasilitas yang digunakan untuk menunjang pelayanan parkir diantaranya sistem berbasis elektronik, bangunan tempat parkir, rambu parkir dan atau petak parkir.
5. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

7. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang oleh Kepala Daerah.

2.4. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Fitri Rosmala Dewi dkk, berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Retribusi Parkir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintahan Kota Palu. Dimuat. Dalam e- Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 6 , 2016 hlm 49-59 ISSN 2302-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pengelolaan retribusi parkir PNS masih belum optimal dilaksanakan di daerah ini, misalnya, kurangnya sosialisasi dan pengumuman publik. Pelaporan dan pemantauan biaya parkir berjalan dengan baik antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Kota Palu. 2. Efisiensi pengelolaan parkir angkutan jalan raya pada tahun 2012 dan 2013 menurut perusahaan angkutan tidak akan efektif pada tahun 2014 dan 2015. Penerimaan tepi jalan sangat efisien. 3. Beberapa kendala dalam memperoleh biaya parkir karcis musiman khusus bagi PNS adalah kurangnya payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut dan kurangnya sosialisasi kepada polisi hutan dan pengguna taman.
2. Penelitian oleh Komang Sutami dkk, berjudul Analisis Pengelolaan Anggaran Retribusi Parkir Kabupaten Buleleng. Dimuat dalam e-Journal *S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol: 8 No: 2 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pengelolaan anggaran retribusi

parkir Kabupaten Buleleng selalu dilaksanakan melalui fungsi-fungsi administratif, antara lain proses perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pemantauan. 2) Kendala utama dalam penetapan anggaran fasilitas parkir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa dilarang parkir di jalan raya, sehingga tidak mungkin dilakukan perubahan jumlah tempat parkir dan luas lahan parkir. anggaran biaya parkir meningkat.

3. Penelitian oleh Delma Marlina Pasla, berjudul Pengaturan Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Kota Manado. Dimuat dalam Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. IV No. 8 Tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan parkir dikota manado sesuai dengan peraturan daerah yang ada yaitu Perda No 6 tahun 2000 tentang Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah Kota Manado No. 3 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum, namun pendapatan dari dana daerah tidak sebanding dengan pendapatannya sehari-hari. Hal tersebut tercermin dari tidak mungkin tercapai tujuan pencapaian biaya parkir di kota Manado dari tahun ke tahun. Pendapatan awal daerah seharusnya meningkat dari tahun ke tahun, mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat di Kota Manado dari tahun ke tahun. Namun, ini tidak sesuai dengan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir.
4. Penelitian oleh Riko Riyanda dan Timbul Dompok, berjudul Kebijakan Parkir Kota Batam Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dimuat dalam Jurnal *Niara* Vol. 10, No. 1 Juli 2017, Hal. 21-29. P-ISSN 1693-3516

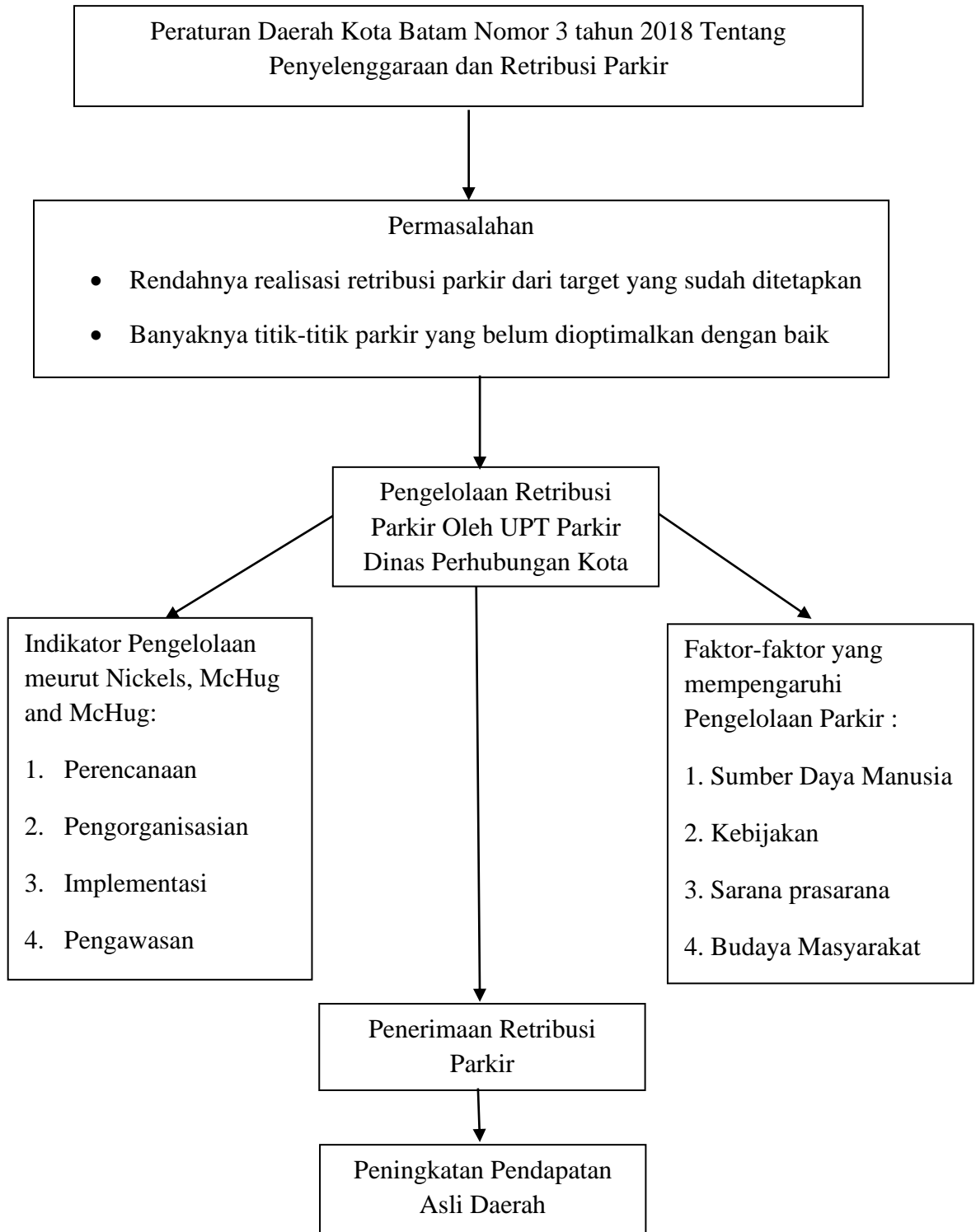
- | E-ISSN 2528-7575 2. Penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut: Pertama, bahwa kebijakan parkir Kota Batam melalui Perda No.1 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir belum optimal dalam pencapaian target dan realisasinya. Berdasarkan data tersebut, kapasitas parkir Kota Batam dapat melebihi target tergantung dari potensi lahan parkir jika dapat dikelola dengan baik. Data dari ruang parkir di UPTD tempat parkir masih terbatas dan implementasinya juga kurang penting. Tren tersebut terhenti dan tidak menunjukkan perubahan pertumbuhan PAD di Kota Batam. Kedua, faktor-faktor yang belum optimalnya penerimaan pajak di Kota Batam: sistem pengelolaan parkir yang belum memadai, indeks kepuasan masyarakat yang belum terlaksana, kinerja pegawai yang tidak efisien, beberapa kegagalan dalam sistem perparkiran di Kota Batam.
5. Penelitian oleh Yulia Febrianti dkk, berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi di Dinas Perhubungan perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo). Dimuat dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1077-1085. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pelayanan parkir di wilayah Kabupaten Sidoarjo masih belum terlaksana dengan baik, hak-hak pengguna parkir yang tidak diminta secara keseluruhan tidak dihormati dan respon terhadap pelayanan parkir yang kurang memuaskan berkeyakinan bahwa pelayanan parkir perlu dioptimalkan. Layanan parkir perlu ditujukan untuk meningkatkan PAD daripada mengoptimalkan layanan parker

6. Penelitian oleh Novelia Malombeke, berjudul Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara. Dimuat dalam Jurnal EMBA Vol.4 No.1-2016, ISSN 2303-1174 Hal.645-655. Studi ini menunjukkan bahwa potensi pajak parkir dapat meningkat setiap tahun dan efisiensinya bervariasi. Namun dengan banyaknya potensi yang ada, terlihat cukup bagus karena terus bertambah setiap tahunnya. Sebaiknya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUB) di Kabupaten Minahasa Utara harus melakukan perhitungan ulang terhadap penetapan target pemungutan Pajak Parkir agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki.
7. Penelitian oleh Rahmawati Widya Putri, berjudul Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Dimuat dalam jurnal JESP-Vol. 8, No 1-2016. ISSN (P) 2086-1575 E-ISSN 2502-7115, hal.23-32. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang mengalami fluktuasi. Pasalnya, pencapaian pungutan parkir yang dicapai hanya ditujukan untuk mencapai target, tanpa memperhitungkan pertumbuhan historis pelaksanaan pungutan parkir per tahun.
8. Penelitian oleh Bobby Fandhi Putra dkk, berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). Dimuat dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.10 No.1-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perolehan manfaat lokal melalui

bentuknya sebagian besar efektif antara tahun 2008 - 2012. Namun, porsi retribusi daerah dalam pendapatan asli daerah kurang mencukupi pada tahun-tahun tersebut dan program-program yang dijalankan oleh pemerintah masih belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban biaya penggunaan saat melakukan pembalasan, serta kurangnya sumber daya manusia atau otoritas daerah yang perlu dioptimalkan seiring dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Dwi Astanti dkk, berjudul *Determination of Roadside Parking Retribution Contract Value using Fuzzy Sugeno Method*. Dimuat dalam Jurnal Proceedings of the International Conference of Business, Economy, Entrepreneurship and Management, Vol.1-2019 ISBN: 978-989-758-471-8, hal 639-645. Penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas parkir di Sleman merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Namun penerimaan retribusi parkir belum optimal. Besaran setoran retribusi parkir pinggir jalan saat ini ditentukan berdasarkan kontrak yang disetujui antara petugas parkir dan pemerintah, serta berdasarkan pertimbangan hasil survei potensi parkir oleh pemerintah. Sistem tersebut dinilai belum mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari retribusi parkir karena besaran retribusi parkir tidak ditentukan berdasarkan peningkatan pendapatan parkir.

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
(Sumber: Peneliti, 2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2014:200). Penelitian ini digunakan dikarenakan untuk merincikan data secara akurat, faktual dan sistematis tentang kejadian yang terdapat dilapangan. Dengan memakai jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengkaji dan memahami fakta tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Kota Batam. Dalam hal ini dilakukan oleh UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam selaku pelaksana teknis daerah yang mengelola jasa parkir.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Spradley (Sugiyono, 2014: 209), fokus penelitian ialah domain tunggal atau beberapa domain yang saling berhubungan dari keadaan sosial. Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis masalah ini, maka penelitian ini difokuskan pada Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Dalam hal ini pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam selaku pelaksana teknis terkait jasa parkir yang menangani seluruh titik-titik parkir yang ada di Kota Batam. Adapun proses pengelolaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang menurut Nickles, McHug and McHug (Mukarom, 2015:55) mengemukakan

empat fungsi manajemen yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam proses pengelolaan yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan atau *planning*, yaitu usaha yang dikerjakan untuk mengantisipasi keadaan masa depan dengan menentukan strategi atau langkah yang sesuai agar dapat terwujudnya keinginan dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian atau *organizing*, yaitu mendesain perencanaan dalam struktur organisasi dengan memastikan seluruh pihak dalam organisasi bias beroperasi secara efisien dan efektif agar tercapainya tujuan organisasi.

3. Pengimplementasian

Pengimplementasian atau *directing*, yaitu pelaksanaan suatu program agar dapat dilaksanakan oleh sumber daya manusia dalam organisasi serta mengarahkan agar seluruh pihak bisa melaksanakan tanggung jawabnya yang disertai kesadaran dan produktivitas tinggi.

4. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan pengawasan atau *controlling*, yaitu memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan, diatur dan dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan sebelumnya

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif istilah yang digunakan bukanlah populasi, tetapi oleh Spradley (Sugiyono, 2014: 215), dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang saling berkaitan. Adapun data-data yang menjadi sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data ini juga merupakan data yang belum pernah ada sebelumnya.

2. Data Sekunder

Data ini dikumpulkan oleh orang lain, bukan ilmuwan. Informasi ini sering diperoleh dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi.

Adapun sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Informan, sebagai sumber data ucapan dan aksi dari informan yang diwawancarai dan diamati sebagai dasar utama dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Lya Ratri Arum	Kassubag, TU, UPT Pelayanan Parkir
2.	Tono Hendrawan	Petugas Parkir
3.	Agus	Petugas Parkir

(Sumber : Survei lapangan Peneliti, 2020)

2. Dokumen, sebagai sumber data digunakan dalam penelitian dokumen sebagai sumber data yang ingin dikaji dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk menafsirkan, meramalkan, bahkan sebagai alat menguji.
3. Tempat dan peristiwa, sumber data ini merupakan tambahan yang dijalankan lewat proses observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berhubungan dengan Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Gunawan (2013:141), terdapat tiga macam cara yang digunakan dalam pengumpulan data secara umum, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu:

1. Observasi, adalah suatu kegiatan yang dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan melihat dan memantau secara langsung dilapangan.
2. Wawancara adalah perbincangan atau pertemuan untuk bertukar pengetahuan, ide dan informasi melalui tanya jawab yang dilakukan dua orang, agar dapat dikonstruksikan dalam suatu pembicaraan topik tertentu. Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan penelitiannya.
3. Dokumentasi, yaitu catatan atau tulisan peristiwa yang masa lalu. Dokumen dapat berupa gambar, lisan, atau karya seni monumental dari individu atau kelompok, sebagai bahan penambah dalam penelitian. Peneliti dalam hal ini memakai buku-buku yang menyokong dalam penelitian.

3.5. Metode Analisis Data

Menurut pendapat Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014: 246-247), bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan sampai tuntas, sehingga datanya menjadi jenuh. Kegiatan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menyebarkan berarti meringkas, memilih hal terpenting, memfokuskan pada hal terpenting, dan mencari objek dan gambar. Oleh karena itu, data yang berkurang memberikan gambaran yang lebih detail dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mungkin mencari lebih banyak data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk penjelasan singkat, diagram, hubungan kelas, dan diagram blok. Teks naratif paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Hasil penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasilnya bisa berupa uraian atau uraian tentang objek yang sebelumnya kabur, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.6. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data dibutuhkan cara pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan ditetapkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan

(*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Moleong, 2011: 320).

Pada penerapan kriteria tingkat kepercayaan tersebut menggantikan konsep validitas internal yang non kualitatif. Kriteria ini berlaku: pertama, melakukan penelitian sedemikian rupa sehingga tingkat kepastian hasil tertentu dapat dicapai; kedua, untuk menunjukkan tingkat kepercayaan pada hasil melalui bukti para peneliti dalam berbagai realitas yang dipelajari.

Kriteria transferabilitas berbeda dari validitas eksternal yang buruk. Konsep validitas menyatakan bahwa generalisasi temuan dapat diterapkan atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama berdasarkan hasil yang diperoleh pada sampel representatif dari populasi tersebut. Portabilitas sebagai masalah empiris bergantung pada kemiripan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk menarik kesimpulan ini, peneliti harus mencari dan mengumpulkan peristiwa empiris tentang kesamaan dalam konteks. Oleh karena itu, peneliti bertanggung jawab untuk memberikan informasi deskriptif yang cukup ketika membuat keputusan transfer. Ini membutuhkan auditor untuk melakukan studi kecil untuk mengkonfirmasi tingkat upaya audit.

Kriteria ketergantungan menggantikan reliabilitas ekspresi dalam studi non-kualitatif. Secara non-kualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan melakukan studi replikasi. Jika penelitian diulangi dua kali atau lebih dengan syarat yang sama dan hasilnya pada dasarnya sama, dikatakan reliabilitas telah tercapai. Konsep reliabilitas lebih luas dari reliabilitas. Hal ini disebabkan pandangannya dari sudut pandang bahwa konsep memperhitungkan segalanya, yaitu apa yang ada dalam

keandalan, serta faktor terkait lainnya.

Kriteria kredibilitas didasarkan pada konsep "tujuan" berkualitas rendah. Kualitas yang buruk menentukan status quo di antara para aktor. Di sini, kepastian apakah sesuatu itu objektif tergantung pada persetujuan, pendapat, pendapat, dan kesimpulannya. Pengalaman seseorang dapat dikatakan subjektif, sedangkan jika diterima oleh lebih banyak orang dapat disebut obyektif.

3.7. Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi

Penelitian ini bertempat di UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam. Selain itu juga peneliti melakukan penelitian di beberapa titik-titik parkir di Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Lubuk Baja yang ada di Kota Batam. Lokasi tersebut dipilih karena mempunyai seluruh aspek pendukung supaya penelitian bisa dilaksanakan sebaik mungkin.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																
		September 2020				Oktober 2020				November 2020			Desember 2020			Januari 2021		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.	Studi Pustaka	■																
2.	Penyusunan Proposal		■															
3.	Pengumpulan Data			■	■	■	■	■	■									
4.	Penelitian Lapangan							■	■	■	■	■	■	■	■			
5.	Pengolahan Data														■			
6.	Analisis dan Kesimpulan															■		
7.	Penulisan Laporan Akhir																■	■
8.	Penyerahan Laporan																	■